

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arah politik luar negeri Tiongkok kerap dikemukakan Xi Jinping dalam pidatonya melalui visi *Chinese Dream* atau Mimpi Tiongkok yang telah disebutkan sejak 2012 dan 2013 ketika Xi Jinping diangkat menjadi presiden.¹ *Chinese Dream* sudah dipublikasikan sebanyak 8 juta artikel oleh akademisi Tiongkok.² Konsep *Chinese Dream* diartikan Xi Jinping sebagai kebangkitan nasional yang menargetkan Tiongkok agar bangkit lagi menjadi negara komunis yang kuat. Kebijakan luar negeri yang diambil untuk mencapai tujuan *Chinese Dream* oleh Xi Jinping adalah membentuk *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) untuk membantu melanjutkan pembangunan dalam proyek yang tercantum dalam *Belt and Road Initiative* (BRI).

Dalam memenuhi visi *Chinese Dream* pada tahun 2013, BRI mulai dipromosikan oleh Tiongkok sebagai proyek yang meningkatkan hubungan ekonomi antar negara dengan investasi miliaran dengan infrastruktur yang besar meliputi rute darat dan rute maritim.³ Xi Jinping mengambil kebijakan luar negeri berupa BRI selaras dengan proyek *New Silk Road* untuk mencakup wilayah Asia, Eropa, hingga ke Afrika Timur. *New Silk Road* sendiri berupa pendekatan ekonomi yang dibawa oleh Tiongkok dengan membuka kerjasama dengan beberapa negara yang terkait ekonomi

¹ BBC, "What Does XI Jinping's China Dream Mean?", 2013, <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22726375> (diakses pada 20 November 2019)

² Michael Wicaksono, Republik Rakyat Chinaa dari Mao Zedong Sampai Xi Jinping (PT Elex Media Komputindo, 2017): 660.

³ Peter Sean Lie, Anak Agung Banyu Perwira, "The Modi Factor: The Role Of Narendra Modi's Idiosyncratic Factors In India's Foreign Policy Responses Towards China Pakistan Economic Corridor", *Andalas Journal of International Studies* Vol VIII No 2, November 2019

dan maritim untuk mengembangkan jaringan perdagangan dengan melintasi banyak negara.⁴ Xi Jinping telah menjelaskan dalam pidatonya pada tahun 2013 di Kazakhstan bahwa visi *Silk Road Economic Belt* bertujuan untuk mengeratkan hubungan ekonomi, kerjasama yang lebih erat, dan memperluas pembangunan di kawasan Euro-Asia.⁵ Selain itu, Tiongkok juga dapat memperoleh keuntungan dengan dilaksanakannya BRI, di mana perbaikan infrastruktur akan memudahkan keluar masuknya barang dari satu negara ke negara lain. Pendekatan ekonomi melalui AIIB juga menyebabkan nilai-nilai ekonomi dan politik Tiongkok lebih banyak digunakan sehingga sesuai dengan tujuan Tiongkok untuk menjadi pusat dunia.⁶

Pembentukan kebijakan BRI melahirkan AIIB dengan harapan agar mampu membangun ekonomi yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur dari benua Asia, Afrika, dan Eropa. Proyek pembangunan BRI yang melintasi ketiga benua yaitu Asia, Afrika, Eropa, dan $\frac{3}{4}$ sumber energi dengan sasaran 4.4 miliar populasi dari 67 negara atau sekitar 63% dari populasi global.⁷ Tiongkok diperkirakan akan mengeluarkan USD 100 miliar per tahun untuk membiayai proyek tersebut.⁸ AIIB juga dilahirkan untuk membangun kerjasama agar mampu memenuhi biaya yang akan digunakan dalam proyek pembangunan infrastruktur dan ekonomi tersebut.

⁴ Christine R. Guluzia, "Making Inroads: China's New Silk Road Initiative", *Cato journal*, vol. 37 No.1, 135.

⁵ President Xi proposes to build "Silk Road economic belt", CCTV, 9/7/2013

⁶ China Power Team. "How will the Belt and Road Initiative advance China's interests?" *China Power*. May 8, 2017, <https://chinapower.csis.org/china-belt-and-road-initiative/> (diakses pada 6 November 2019)

⁷ Raphael ZiroMwatela, Zhao Changfeng, "Africa in China's One Belt One Road Initiative: A Critical Analysis", *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 21, 2 Ver 1, pp. 11. Desember 2016

⁸ Penelope Marbler, Lea Shan, "Chinese Investments in Infrastructure Worldwide", *Institut De Relations Internationales Et Strategiques (IRIS), Asia Focus* 36 dalam *Asia Programme*, pp. 2. Juni 2017

AIIB sebagai sebuah bank multilateral memiliki misi untuk membangun ekonomi dan sosial di wilayah Asia dengan 100 anggota.⁹ Meskipun berbentuk multilateral dengan banyak anggota, Tiongkok tetap memiliki peran besar di dalam AIIB. Hal ini dilihat dari keberadaan pusat AIIB di Beijing, Tiongkok.

Sebagai pemimpin Tiongkok, Xi Jinping memastikan ketiga posisinya yaitu presiden, sekretaris partai, dan sebagai ketua Komisi Militer Pusat (KMP) Tiongkok, serta menerapkan aturan anti korupsi yang keras.¹⁰ Xi Jinping juga menepati janji awalnya untuk melakukan gerakan anti korupsi hingga akhirnya masa jabatan yang seharusnya hanya berlaku 10 tahun kemudian dicabut menjadi seumur hidup.¹¹ Keputusan Xi Jinping ini menunjukkan bahwa Tiongkok telah mengalami perubahan dari pemerintahan yang bersifat *collective leadership* menjadi *personalistic dictatorship*.¹²

Shirk melanjutkan dalam tulisannya bahwa perubahan bentuk kepemimpinan dari *collective leadership* menjadi *personalistic dictatorship* ditandai dengan adanya pergeseran keputusan yang dilakukan oleh pemimpin Tiongkok dalam membawa kebutuhan modernisasi ekonomi dan sosial, di mana Partai Komunis China (PKC) yang awalnya mengadaptasi cara-cara partai komunis dari Uni Soviet dan Eropa Timur tetapi akhirnya dirasa telah kehilangan kekuasaan. Sehingga dari pada

⁹ AIIB, "Who we are", <https://www.aiib.org/en/about-aiib/index.html> (diakses pada 28 Oktober 2019)

¹⁰ Minnie Chan, "Hu Jintao's weak grip on China's army inspired Xi Jinping's military shake-up: sources President's predecessor 'isolated' by deputies who acted as proxies for Jiang Zemin: sources", South China Morning Post, 2015, <https://www.scmp.com/news/china/article/1734663/hu-jintaos-weak-grip-chinas-army-inspired-president-xi-jinpings-military> (diakses pada 20 November 2019)

¹¹ Celia Hatton, "Papa Xi Tightens Up His Grip", BBC Indonesia, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43286205>, (diakses pada 31 Agustus 2018)

¹² Susan L. Shirk, "China in Xi's "New Era": The Return to Personalistic Rule", *Journal Of Democracy* (2), 2018: 22-36.

penggunaan lembaga, Xi lebih berusaha untuk semakin memperkuat kekuasaannya. Hal ini dapat dilihat melalui banyaknya bagian dalam partai yang diketuai secara langsung oleh Xi Jinping. Salah satunya Xi Jinping juga menjadi pemimpin dalam Kelompok Kecil Terkemuka mengenai Reformasi Pendalaman Komprehensif dengan tiga anggota Komite Tetap Politbiro di mana pertemuan terjadi setiap bulan untuk menentukan kebijakan khusus tentang berbagai masalah, termasuk di dalamnya mengenai ekonomi.¹³ Xi Jinping juga menggunakan Komisi Disiplin dalam melawan pejabat lokal yang gagal dalam melaksanakan kebijakan ekonomi dan lingkungan.

Dalam proses perumusan kebijakan luar negeri, secara garis besar Partai Komunis akan memberikan rekomendasi rencana jangka panjang sebagai dasar kebijakan yang akan diambil. Lalu *drafting* dapat dilakukan oleh menteri maupun aktor lainnya seperti Xi Jinping, kemudian mengalami revisi dan disampaikan kepada dewan untuk diimplementasikan. Namun, prosedur yang disebutkan masih sangat minim mengenai transparansi dan bagaimana kebijakan terbentuk dibelakang ruangan. Jabatan Xi Jinping dalam kelompok-kelompok dan komite tersebut berperan penting dalam tiap pengambilan keputusan yang akan dilakukan Tiongkok. Secara garis besar, proses kebijakan luar negeri Tiongkok paling penting dipegang oleh Komite Tetap Politbiro CPC yang menjadi anggota paling kuat dari Komite Sentral.¹⁴ Komite tersebut diketuai oleh Xi Jinping, menjadikannya pemimpin tertinggi dalam pembuatan keputusan.

¹³ Christopher K. Johnson, Scott Kennedy, and Mingda Qiu, "Xi's Signature Governance Innovation: The Rise of Leading Small Groups," Center for Strategic and International Studies, 17 October 2017, www.csis.org/analysis/xis-signature-governance-innovation-rise-leading-small-groups (diakses pada 23 Januari 2020)

¹⁴ Linda Jakobson, Ryan Manuel, "How Are Foreign Policy Made In China?", *Asia & the Pacific Policy Studies*, vol. 3, no. 1, 2016: 103.

Ambisi Xi Jinping dalam bidang ekonomi ini juga dapat dilihat melalui isi pidato pembentukan AIIB saat upacara inaugurasi AIIB pada bulan Januari tahun 2016, di mana Xi Jinping menyebutkan bahwa Tiongkok sebagai penggagas AIIB siap untuk menyumbangkan USD 50 juta sebagai dana persiapan khusus pembangunan infrastruktur.¹⁵ Sebagai bank multilateral, Tiongkok menyampaikan bahwa AIIB juga terbuka untuk berkolaborasi dengan institusi keuangan internasional, Tiongkok juga memiliki saham yang lebih besar dibandingkan negara lainnya yaitu sebesar 30%, meski Tiongkok menyatakan tidak akan memiliki hak veto formal.¹⁶

Keberadaan AIIB juga menimbulkan kekhawatiran karena sebelumnya telah ada *Asian Development Bank* (ADB) yang dibentuk oleh Jepang dan Amerika Serikat di mana sasaran utamanya adalah negara – negara Asia. Tetapi, Xi Jinping secara tegas menyatakan bahwa AIIB dimanfaatkan sebagai penyatu kekuatan bank multilateral dan lembaga yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan infrastruktur di Asia.¹⁷ Untuk itu, AIIB datang sebagai media kerja sama terutama untuk negara kawasan Asia dalam membangun infrastruktur dan ekonomi negara, berbeda dengan ADB yang berfokus pada penghapusan kemiskinan dan untuk pendidikan. AIIB juga berbeda dari *Multilateral Development Bank* (MDB) karena MDB lebih berfokus pada pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, reduksi, dan pembangunan sosial. Sementara AIIB berfokus pada pembangunan infrastruktur dan

¹⁵ Xinhua, “Full text of Chinese President Xi Jinping's address at AIIB inauguration ceremony”, ChinaDaily (Januari 2016), http://www.chinadaily.com.cn/business/2016-01/16/content_23116718_3.htm (diakses pada 28 Oktober 2019)

¹⁶ Thomas Zimmerman, “The New Silk Roads: China, the U.S, and the Future of Central Asia”, Center On International Cooperation, Oktober 2015.

¹⁷ Jagannath P. Panda, “AIIB Chronicle: China’s Ambition Behind Asian Infrastructure Investment Bank”, Institute For Defence Studies And Analyses, Maret 2017.

membangun hubungan kerjasama antar negara – negara di benua Asia, Afrika, dan Eropa.¹⁸

Xi Jinping dalam pidatonya pada KTT konferensi tentang langkah – langkah Membangun Keyakinan (CICA) di Shanghai pada Mei 2014, Xi Jinping menyebutkan bahwa ancaman keamanan semakin meningkat dan perdamaian akan berkaitan erat dengan pembangunan di Asia.¹⁹ Oleh sebab itu, menurut Xi akan lebih baik apabila permasalahan ekonomi dan keamanan kawasan Asia ditangani oleh negara – negara Asia itu sendiri. Pernyataan Xi tersebut mengindikasikan bahwa di masa kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok lebih percaya diri dan proaktif di dalam sistem internasional untuk mencapai visi *Chinese Dream*.²⁰ Meski begitu, keputusan Xi Jinping membentuk AIIB juga mendapatkan kritik. AIIB dinilai beresiko menyebabkan permasalahan tumpang – tindih dengan ADB, kemungkinan besar terjadinya tindakan korupsi karena investasi besar yang diberikan, serta potensi terjadinya kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan infrastruktur.²¹ Tetapi, Xi Jinping sebagai reformator yang visioner dan berkomitmen untuk masa depan

¹⁸ Cindy Rezma Fanny, Dwi A Nur Arifianti, Erlandi Daffa Augusta, “Asian Infrastructure Investment Bank

(AIIB) Sebagai Bentuk Hegemoni Baru Tiongkok”, *Nation State: Journal of International Studies*, Vol. 2 No. 1, Juni 2019.

¹⁹ Ministry Of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “The 4th Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia (CICA) Summit Held in Shanghai Xi Jinping Presides over the Summit and Delivers Important Speech, Advocating Common, Comprehensive, Cooperative and Sustainable Security in Asia for New Progress in Security Cooperation of Asia”, Mei 2014. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/yzxhxzyrcshydscfh/t1162057.shtml (diakses pada 6 November 2019)

²⁰ Camilla T.N Sorensen, “The Significance of Xi Jinping’s “Chinese Dream” for China Foreign Policy: From “Tao Guang Yang Hui” to “Fen Fa You Wei””, *JCIR*: Vol. 3, No. 1 (2015).

²¹ Kanying Xu, “The Potential Impact of Asian Infrastructure Investment Bank on economic growth in Asian Developing Countries: Opportunities and Challenges”, *Aalto University School Of Business*, 2015. <https://pdfs.semanticscholar.org/b340/3605b5132c21030063b3321d5f8fd3b56faa.pdf> (diakses pada 6 November 2019)

Tiongkok tidak melihat resiko tersebut.²² Oleh karena itu, persepsi Xi Jinping yang akhirnya membentuk AIIB untuk menunjang proyek BRI menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk mencapai visi *Chinese Dream*, Xi Jinping membentuk AIIB sebagai stimulus pelaksanaan proyek BRI. AIIB berfungsi sebagai sarana pendekatan ekonomi untuk membantu jalannya investasi pengembangan infrastruktur di kawasan Asia. AIIB sendiri memberikan tantangan masa depan bagi Tiongkok terkait masalah tumpang – tindih fungsi dengan ADB sebagai institusi yang telah lama melaksanakan peran yang di “tiru” oleh AIIB. Selain itu, kemungkinan terjadinya korupsi, hingga masalah lingkungan sebagai efek dari pembangunan juga tercatat sebagai tantangan bagi Tiongkok. Pembentukan AIIB berbeda dari pendekatan ekonomi pemerintahan Tiongkok sebelumnya yang lebih berfokus pada pemerataan ekonomi di dalam negeri dan kerjasama bilateral. Pembentukan AIIB memperlihatkan upaya Xi Jinping untuk membawa Tiongkok lebih proaktif dalam sistem internasional dengan jangkauan kawasan lebih luas. Fakta tersebut memperlihatkan adanya perubahan *collective leadership* Tiongkok menjadi *personalistic dictatorship* yang menempatkan persepsi Xi Jinping menjadi faktor yang berpengaruh besar dalam setiap kebijakan Tiongkok saat ini. Oleh sebab itu, persepsi Xi Jinping dalam membentuk AIIB untuk menunjang proyek BRI menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

²² DingDing Chen, “4 Reason Xi Jinping is A Serious Reformer”, The Diplomat, September 2014. <https://thediplomat.com/2014/09/4-reasons-xi-jinping-is-a-serious-reformer/> (diakses pada 6 November 2019)

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitiannya yang hendak dijawab yaitu bagaimana persepsi Xi Jinping dalam pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank*?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Xi Jinping terhadap pembentukan *Asian Infrastructure Investment Bank*

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara akademis penelitian ini akan menambah referensi kepustakaan kajian kebijakan luar negeri Tiongkok
2. Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah tentang teori dan konsep individu dalam Ilmu Hubungan Internasional dan mampu melihat bahwa individu juga memiliki peran dan pengaruh dalam hubungan internasional.

1.6 Kajian Pustaka

Masuknya kebijakan luar negeri untuk menghadapi situasi politik yang stabil, Xi Jinping sebagai pemimpin negara Tiongkok menyebutkan visi *Chinese Dream* dalam merangkum tujuan yang ingin dicapainya. Murray Scott Tanner, dalam artikelnya

berjudul “*China’s dream, Xi’s Party*” menjelaskan bahwa pada tahun 2015, Tiongkok tengah mengalami banyak hambatan untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negaranya. Di mana baik dari segi lingkungan maupun dari segi pertahanan dan keamanan negaranya sedang berada di jalur yang tidak baik. Untuk menghadapi hal ini, Xi menginisiasikan pencegahan terbentuknya koalisi tandingan di wilayah Asia dengan membentuk komunitas bersama yang dikenal dengan sebutan “*One Belt One Road*” dan “*Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*”, dengan tujuan membentuk dunia baru di mana semua orang menjadi pemenang.²³

Tulisan ini menjelaskan mengenai berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh Xi Jinping dalam mencapai visi *Chinese Dream* nya. Tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga Tiongkok dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Pada penurunan ekonomi tahun 2015 sendiri, Tiongkok tetap berupaya untuk mempertahankan tujuannya agar mampu menjadi negara yang stabil politik domestiknya, memperbaiki nilai ekspor dan impor, serta memperbaiki aset – aset investasi negara. Namun, diakhir tahun ternyata ekonomi Tiongkok tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tetapi kebijakan Tiongkok untuk membentuk komunitas infrastruktur terus berjalan hingga pembentukan investasi infrastruktur melalui inisiatif *New Silk Road* dalam proposal bulan Oktober AIIB untuk memperkuat hubungan antara Tiongkok dengan negara – negara Asia Tenggara tetap berjalan. Meskipun Amerika Serikat melihat kekhawatiran mengenai Tiongkok yang berpengaruh dalam bank dan aturan yang dikelola oleh AIIB tersebut.

²³ Murray Scott Tanner, “China’s Dream, Xi’s Party”, *Asian Survey*, Vol. 56, Number 1, (2016): 19–33.

Tulisan ini menunjukkan bahwa *Chinese Dream* yang dibawa oleh Xi Jinping tidak hanya membawa isu ekonomi untuk mendorong kebangkitan Tiongkok, tetapi kebijakan Xi Jinping bergerak dalam banyak bidang seperti ekonomi dalam negeri, ekonomi luar negeri, modernisasi militer, koalisi dengan negara – negara dalam satu kawasan, hingga mencoba untuk membangun kerjasama dalam bidang perbankan melalui infrastruktur. Meski diawal ditunjukkan bahwa keputusan – keputusan yang diambil oleh Xi Jinping tidak terlalu berpengaruh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Tiongkok di tahun 2015, tetapi Xi Jinping tetap fokus pada tujuan utamanya dan berusaha meneruskan agenda pembuatan komunitas bersama dengan negara – negara di Asia Tenggara.

Kemudian dalam tulisan dari Jean Pierre Cabestan, “*Is Xi Jinping The Reformist Leader China Need?*.”²⁴ Dalam tulisan ini dijelaskan biografi Xi Jinping hingga mengenai pernikahannya dari sebelum Xi Jinping menjabat menjadi pemimpin Tiongkok. Penulis juga menjelaskan perbedaan politik yang dibawa oleh pemimpin Tiongkok sebelumnya seperti dari Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, dan Hu Jintao.

Penjelasan mengenai Xi Jinping dalam tulisannya membentuk perspektif baru di mana Xi Jinping dijelaskan secara lebih positif berdasarkan pendapat masyarakat di dalam negerinya. Sementara dari negara seperti Amerika Serikat dan Jepang yang merasa akan disaingi oleh Tiongkok terutama dalam hal ekonomi, Xi Jinping dinilai sebagai sosok yang sulit ditebak. Beberapa praktik politik yang dilihat adalah melalui

²⁴ Jean Pierre Cabesta, “Is Xi Jinping The Reformist Leader China Need?”, *China Perspective* (Oktober 2012): 69-76.

pembangunan karakter Xi Jinping dari awal yang begitu konservatif seperti Mao Zedong tetapi dalam praktik negosiasinya Xi Jinping memilih untuk pembangunan kerja sama dari pada konfrontasi. Sehingga hal ini menjadi bentuk yang tidak terduga dari seorang pemimpin Tiongkok.

Dalam tulisan Malcolm Cook yang berjudul, *“China’s Power Status Change: East Asian Challenges for Xi Jinping’s Foreign Policy”*, dijelaskan mengenai ketakutan yang muncul dalam menanggapi politik kebijakan luar negeri Tiongkok. Ketakutan ini dijelaskan dalam kawasan Asia Timur di mana negara-negara yang berada di sekitarnya mulai khawatir bahwa kepentingan politik luar negeri Tiongkok berubah agresif dan mendorong hegemoni di Asia Timur serta ketergantungan ekonomi pada Tiongkok.²⁵ Penelitian ini juga menjelaskan bahwa negara-negara di kawasan Asia Timur merespon kebijakan politik luar negeri Tiongkok sebagai jalan untuk menaikkan kekuatan dan kekuasaan Tiongkok agar mampu melakukan hegemoni dan menjadi kekuatan terbesar di kawasan Asia Timur. Ini ditunjukkan dengan pernyataan negara anggota G7 yang menyatakan penolakannya terhadap negara yang memaksakan kekuasaan dan intimidasinya untuk menegaskan klaim wilayah atau maritimnya secara kekerasan bukannya melalui jalur hukum internasional. Begitupun dengan penolakan yang diberikan oleh negara anggota ASEAN karena ketakutan akan hegemoni oleh Tiongkok.

Penulis melihat peran Amerika Serikat yang telah lama memasuki wilayah Asia juga menjadi salah satu tantangan Tiongkok dalam membuka interaksi

²⁵ Malcolm cook, “China’s Power Status Change: East Asian Challenges for Xi Jinping’s Foreign Policy” *China Quarterly of International Strategic Studies* Vol. 1, No. 1

hubungan internasionalnya di kawasan Asia. Tiongkok kemudian datang dengan politik yang mengatakan bahwa masalah yang ada di kawasan Asia harusnya diselesaikan oleh negara Asia, bukan Amerika Serikat. Selain itu, Tiongkok juga menghadapi tantangan ini dengan membentuk adanya AIIB yang memberikan citra positif pada Tiongkok sebagai pemimpin di mana anggotanya banyak berasal dari negara – negara Asia. Dengan ini, penulis melihat Tiongkok lebih banyak membuka peluang kerjasama baik bilateral dengan negara tetangga maupun secara multilateral untuk membentuk citra yang lebih baik melalui kerjasama. Hal ini didukung dengan diadakan pertemuan antara Presiden Xi, Perdana Menteri Abe, dan Presiden Aquino di APEC tahun 2014 untuk membahas hubungan multilateral Tiongkok, Jepang, serta Filliphina. Untuk itu, politik luar negeri Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping banyak berdasarkan pada kerjasama ekonomi dan tindakan militer.

Penelitian ini juga melihat beberapa artikel jurnal dari peneliti sebelumnya mengenai level analisis individu untuk dijadikan acuan dalam penelitian. Artikel jurnal dari Dinda Arum Sari Laksono yang berjudul *“Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif”* di jelaskan mengenai karakteristik pemimpin Shinzo Abe melalui idiosinkratiknya sangat mempengaruhi adanya perubahan arah politik dari pasifisme idealis menjadi pasifisme proaktif yang dianut oleh Jepang. Faktor – faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan tidak hanya berasal dari

latar belakang pengalaman hidup pemimpin tersebut tetapi dari karakter dan wataknya sendiri.²⁶

Shinzo Abe dijelaskan memiliki karakteristik yang *narcisist* sehingga dalam membawa arah politik Jepang, Shinzo Abe terkesan tidak mudah goyah karena memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta ambisi yang kuat. Selain itu, dalam faktor idiosinkratik juga dijelaskan bahwa dalam membuat keputusan adanya *situational characteristic* di mana keputusan pemimpin juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial tempatnya berada. Dalam kasus ini, Shinzo Abe dihadapkan pada pilihan untuk menjadikan Jepang negara yang lebih kuat menghadapi munculnya kekuatan Tiongkok dari negara Asia Timur.

Dan yang terakhir tulisan Susan L. Shirk yang berjudul “*China in Xi’s “New Era”: The Return to Personalistic Rule*” tulisan ini menjelaskan mengenai perubahan arah kepemimpinan Tiongkok setelah era Mao Zedong yang kembali lagi menjadi *personalistic dictatorship* memasuki era Xi Jinping setelah lama berada pada *collective leadership*.²⁷ Dalam tulisan ini peneliti menjelaskan mengenai bagaimana Xi Jinping kembali mengubah arah pemerintahan di Tiongkok. Dimulai dengan hilangnya masa jabatan Presiden Tiongkok yang seharusnya masa jabatan Xi Jinping akan berakhir pada tahun 2022, kini tidak lagi memiliki batas. Selain itu, banyaknya lembaga kecil muncul dengan dipimpin langsung oleh Xi Jinping menunjukkan penggunaan lembaga seperti PKC mengalami perubahan yang cukup signifikan.

²⁶ Dinda Arum Sari Laksono, “Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif.”, jurnal analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, 2019.

²⁷ Susan L. Shirk, “China in Xi’s “New Era”: The Return to Personalistic Rule”, Journal of Democracy, Vol. 2, issue 2, 2018: 22-36.

Perubahan ini sendiri dinilai oleh Xi Jinping agar kendali lebih total dan terpusat, contohnya pada penyensoran dibidang media lebih terkonsolidasi dan terpusat. Terbentuknya administrasi *Cyber* baru yang lebih kecil dan dipimpin oleh Xi Jinping bertujuan untuk memenangkan “perjuangan untuk opini publik” seperti yang disebutkan oleh Xi Jinping. Sehingga, ruang gerak jurnalis dan warganet lebih dipersempit.

Shirk menjelaskan perubahan ini dapat terjadi karena adanya faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu pertama tidak adanya aturan tertulis yang mengatur mengenai pergantian kepemimpinan dalam Partai seperti PKC seperti aturan mengenai penetapan usia pensiun atau masa jabatan untuk anggota Komite Sentral, Politbiro, Komite Tetap Politbiro, maupun untuk sekretaris Jendral. Kedua, pemimpin yang telah pensiun masih bisa menggunakan pengaruhnya secara informal. Ketiga, krisis yang disebabkan Tiannamen Tiongkok sebelumnya masih memberikan efek yang bertahan lama. Keempat, tidak ada penegakan hukum di luar Partai Komunis Tiongkok. Kelima, partai-partai komunis memiliki masalah otoritas yang ambigu mengenai wewenang dan kekuasaannya. Keenam, adanya kegagalan *collective leadership* pada masa Hu Jintao yang memberikan efek dramatis pada naiknya Xi Jinping. Faktor – faktor tersebutlah yang menurut Shirk menjadi pendukung perubahan arah pemerintahan di Tiongkok yang akhirnya dinilai berpotensi membentuk kebijakan – kebijakan luar negeri Tiongkok yang sama ambisiusnya dengan karakteristik Xi Jinping sendiri.

Berdasarkan penjabaran tulisan di atas, kajian mengenai persepsi Xi Jinping mengenai dibentuknya AIIB menimbulkan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut dalam ilmu hubungan internasional.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kebijakan luar negeri

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis akan melihat melalui kebijakan luar negeri dengan level analisis individu. Hermann menyebutkan bahwa peran individu dalam membuat keputusan untuk kebijakan politik negara sangat berpengaruh, baik untuk membawa negara dalam hubungan yang agresif maupun damai dengan negara lain.²⁸ Analisis kebijakan melalui karakteristik individu diharapkan dapat melihat cara pemimpin merepresentasikan suatu negara yang akan mempengaruhi perkembangan dan arah tujuan politik negara untuk kedepannya.

Kebijakan luar negeri merupakan peranan penting yang diputuskan oleh negara sebagai strategi dalam mendapatkan kepentingan nasionalnya. George Modelski menjelaskannya sebagai suatu sistem yang dikembangkan untuk mengubah perilaku negara lain agar sesuai dengan negara dan lingkungan internasional, selain itu kebijakan luar negeri tidak hanya berubah tetapi juga mengalami kelanjutan dari perilaku pada waktu yang berbeda.²⁹ Hermann mendefenisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan yang sengaja diambil oleh negara baik diputuskan oleh individu

²⁸ Dinda Arum Sari Laksono, "Pengaruh Idiosinkratik Shinzo Abe Terhadap Upaya Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jepang Dari Pasifisme Idealis Menjadi Pasifisme Proaktif.", jurnal analisis Hubungan Internasional, Vol. 7 No. 3, (desember 2018)

²⁹ Laura Neack, "The New Foreign Policy: Power Seeking in a Globalized Era", Rowman & Littlefield Publishers; Second Edition edition (June 27, 2008)

maupun kelompok.³⁰ Lebih lanjut dalam tulisan Bojang, pengambilan keputusan kebijakan luar negeri melibatkan serangkaian proses dan aktor internasional di dalamnya dengan tujuan yang sama untuk mencapai kepentingan nasional negara.

1.7.2 Persepsi

Dalam menganalisis fenomena yang terjadi di lingkungan hubungan internasional untuk membentuk kebijakan luar negeri, analisis individu dapat menjadi salah satu yang berperan penting. Sprout menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan kebijakan oleh individu itu sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti nilai di masyarakat, karakter nasional, budaya politik dan tradisi sejarah bangsa, ciri-ciri struktural bangsa, tingkat industrialisasi, dan bentuk pemerintahan hingga isu yang sedang berlangsung.³¹ Faktor tersebut mempengaruhi persepsi individu melalui nilai – nilai yang diperoleh dan kemudian akan dikelola untuk menentukan keputusan yang akan diambil. Persepsi dianggap sebagai pandangan individu untuk menanggapi suatu isu sesuai pengalaman dan tujuannya.

Dalam tulisannya, Marijke Breuning menjelaskan bahwa level analisis terbagi menjadi tiga yaitu individu, negara, dan sistem. Individu disebutkan sebagai gambaran pemimpin yang juga memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan untuk negara. Persepsi dan kesempatan bagi negara untuk mencapai kepentingan nasional juga bergantung pada keterampilan dan ketertarikan serta minat pemimpin

³⁰ Bojang AS, “The Study of Foreign Policy in International Relations”, J Pol Sci Pub Aff, Volume 6 6, Issue 4 2018: 2.

³¹ Abubakar Eby Hara, “Analisis Politik Luar negeri: Dari Realisme Sampai Konstruktivisme”, Nuansa, Bandung 2011: 105.

dalam kebijakan luar negeri.³² Memahami arah dan tujuan dari pemimpin akan memudahkan untuk melihat tujuan dari kebijakan luar negeri negara itu sendiri. Untuk itu, peranan dan persepsi individu dilihat sebagai objek yang tidak bisa dielakkan dalam memahami keputusan kebijakan luar negeri suatu negara.

Keputusan dalam membuat kebijakan luar negeri negara akan dipengaruhi langsung oleh pemimpinnya, sehingga analisis pada keputusan kebijakan luar negeri harus dipusatkan pada perilaku individu pemimpin keputusan tersebut.³³ Cara setiap pemimpin akan berbeda dalam memberikan tanggapan terhadap tiap isu yang sedang berlangsung, untuk itu dalam melihat alasan tiap kebijakan luar negeri harus melihat langsung pada perilaku dan kebiasaan pemimpin itu sendiri. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Falkowski sebagaimana motivasi individu akan menentukan serangkaian perilaku tertentu yang diambilnya.³⁴ Persepsi maupun sudut pandang individu akan mempengaruhi caranya dalam menentukan pilihan. Persepsi dan keputusan individu tersebut dipengaruhi oleh adanya perbedaan keyakinan, lingkungan, dan latar belakang.

Holsti menjelaskan dalam tulisannya mengenai persepsi yang terkait keyakinan, citra, dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Keyakinan yang dianut oleh seorang pemimpin akan berpengaruh dalam keputusan pemimpin tersebut untuk menentukan kebijakan yang diambil. Sejalan dengan hal ini, citra yang terbentuk bagi

³² Hermann et al., "Who Leads Matters: The Effects Of Powerful Individual", *International Studies Review*, Vol.3 No.2, Leaders, Groups, and Coalitions: Understanding the People and Processes in Foreign Policymaking (Summer, 2001), pp. 83-131

³³ Nitai Chakrabarti, "Beliefs, Perception, And Foreign Policy: The Need Of Perspective", *The Indian Journal of Political Science*, Vol. 49, No. 3 (July - Sept. 1988), pp. 328-342.

³⁴Falkowski, L. S., "Introduction: evaluating psychological models," in L. S. Falkowski (ed.) *Psychological Models in International Politics*. Boulder, CO: Westview Press, 1979:125-167.

individu maupun negara juga akan mempengaruhi keputusan pemimpin tersebut. Lebih jelasnya, Holsti mendefinisikan masing – masing faktor tersebut, yaitu³⁵;

1. Sistem keyakinan (*belief system*) dijelaskan sebagai hal yang diyakini oleh pemimpin terhadap aktor lain maupun situasi yang dipercayai. Keyakinan ini nantinya akan berpengaruh pada pembentukan citra seorang pemimpin.
2. Citra (*Image*) adalah gambaran mengenai individu maupun negara tersebut. Citra negara juga diartikan sebagai citra nasional dengan melihat keputusan yang diambil akan disesuaikan dengan situasi dan citra negara tersebut. Sehingga, keyakinan pemimpin tersebut dapat dipengaruhi oleh citra yang telah terbentuk oleh negara baik dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan.

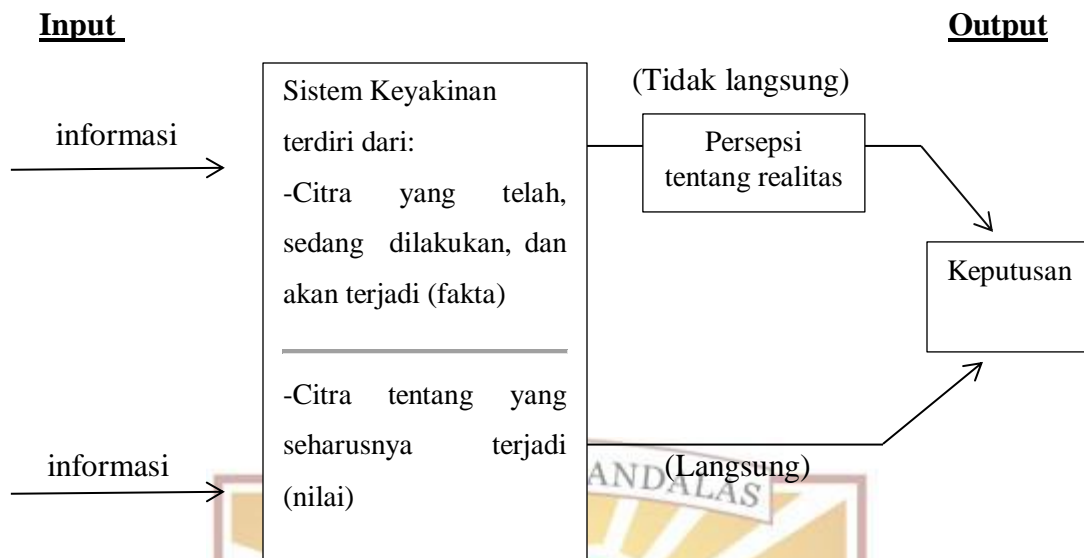
Persepsi kemudian dijelaskan sebagai sudut pandang individu yang dipengaruhi oleh informasi yang diterimanya di mana Holsti membedakannya kedalam dua bagian, pertama individu mengelolanya melalui keyakinan yang diterima berdasarkan kejadian atau peristiwa yang telah berlangsung sebelumnya. Peristiwa tersebut secara tidak langsung kemudian mempengaruhi persepsi individu dalam membentuk keputusan yang akan diambil. Kedua, informasi yang diperoleh individu untuk menerapkan inovasi baru mengenai citranya juga mempengaruhi secara langsung cara individu dalam membentuk suatu kebijakan yang akan diambilnya.

Informasi serta keyakinan dan keadaan lingkungan tersebutlah yang membentuk persepsi individu dalam menentukan kebijakan yang akan diputuskannya untuk menanggapi isu atau keadaan di dunia internasional. Citra yang terbentuk pada negara

³⁵ Ole R. Holsti, “Making American Foreign Policy”, Routledge, New York, 2006: 23-25.

dan individu mempengaruhi keyakinan individu itu sendiri maupun sebaliknya, sehingga keyakinan berpengaruh dalam membentuk persepsi individu sebagai penentuan referensi atau penetapan tujuan yang akan dicapai oleh negaranya. Sedangkan preferensi untuk membandingkan satu keputusan yang diambil dibandingkan dengan keputusan lainnya disebut sebagai nilai dalam proses pencapaian keputusan untuk kebijakan luar negeri negara. Holsti menjelaskan mengenai hal ini melalui bagan:





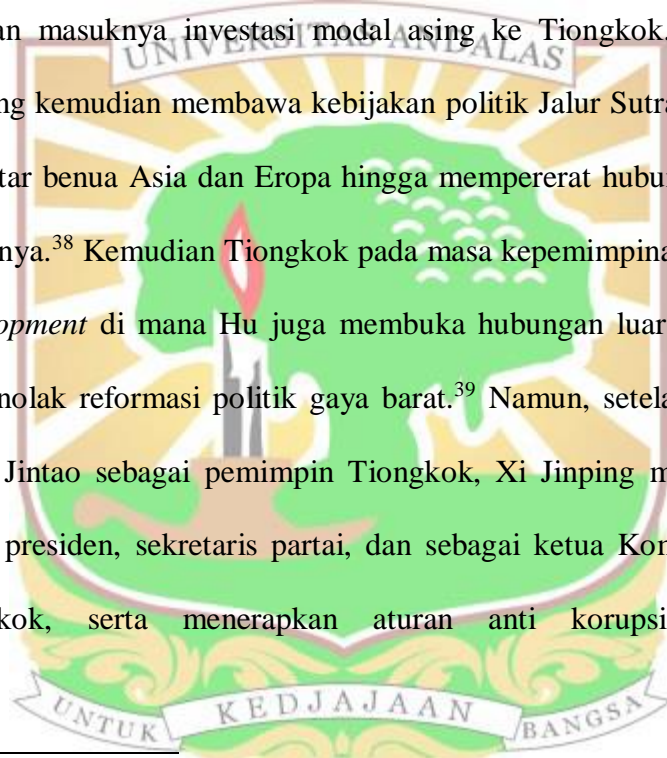
Gambar 1.7.2 : bagan pengaruh sistem keyakinan dan persepsi dalam membentuk keputusan

Sumber: Ole R. Holsti, *Making American Foreign Policy*, (Routledge Taylor & Francis Group: New York, 2006), hal. 25

Berdasarkan bagan di atas, persepsi yang dibentuk oleh individu berasal dari berbagai macam informasi yang diterima baik yang telah terjadi, sedang terjadi atau seharusnya terjadi sesuai keyakinan yang dimiliki oleh individu. Segala informasi yang diperoleh inilah nantinya yang akan mempengaruhi dan diolah oleh individu untuk membentuk suatu keputusan. Perbedaan keyakinan tiap individu itulah yang akan membentuk keputusan berbeda dalam menanggapi situasi internasional. Informasi yang diperoleh individu baik dari lingkungan maupun fakta atau pengetahuan membentuk rangkaian sudut pandang individu. Dengan demikian, individu membentuk keputusannya dapat berasal dari citra yang sudah terbentuk meliputi masa lalu, masa kini, masa depan yang diharapkan terjadi, dan nilai yang seharusnya terbentuk.

Hal ini dapat dilihat melalui Tiongkok yang telah mengalami perubahan kepemimpinan dari yang bersifat *collective leadership* menjadi *personalistic*

dictatorship. Perubahan ini dinilai melalui perbedaan keputusan yang diambil oleh Xi Jinping dari pemimpin Tiongkok sebelumnya, seperti pada masa Mao Zedong kebijakan yang diterapkan yaitu *The Great Leap Forward* yang masih berfokus pada pemerataan di Tiongkok namun sayangnya tidak begitu memberi dampak positif terutama di dalam negeri.³⁶ Sementara pada masa Deng Xiaoping diterapkan kebijakan *Open Door Policy* di mana Tiongkok mulai berperan dalam sistem internasional dan masuknya investasi modal asing ke Tiongkok.³⁷ Setelah Deng, Jiang Zemin yang kemudian membawa kebijakan politik Jalur Sutra untuk membuka perdagangan antar benua Asia dan Eropa hingga mempererat hubungan negara yang masuk di dalamnya.³⁸ Kemudian Tiongkok pada masa kepemimpinan Hu Jintao yaitu *Peaceful Development* di mana Hu juga membuka hubungan luar negeri Tiongkok meski tetap menolak reformasi politik gaya barat.³⁹ Namun, setelah turunnya Jiang Zemin dan Hu Jintao sebagai pemimpin Tiongkok, Xi Jinping memastikan ketiga posisinya yaitu presiden, sekretaris partai, dan sebagai ketua Komisi Militer Pusat (KMP) Tiongkok, serta menerapkan aturan anti korupsi yang keras.⁴⁰



³⁶ Adriana Palase, "The Great Leap Forward (1958-1961) Historical events and causes of one of the biggest tragedies in People's Republic of China's history" (master's thesis, Lunds Universitet, 2009), 15.

³⁷ Ida Bagus Gde Restu Adhi, "Dampak Open Door Policy Yang Diterapkan Deng Xiaoping Terkait Peningkatan Sektor Industri Cina Pasca Reformasi 1978" *Jurnal Hubungan Internasional* (2012), 7, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/view/8566> (diakses pada 11 Mei 2019).

³⁸ Rolly Jean Marten, "Kepentingan Tiongkok dalam Pembentukan Shanghai Cooperation Organization", *JOM FISIP* Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015): 10, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/viewFile/7240/6921> (diakses pada 10 Mei 2019)

³⁹ Nora Saldia Haloho, "Reaksi Terhadap Strategi Peaceful Development di Samudera Hindia Tahun 2008-2018", *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 7, Nomor 1, (2019): 001-014, <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/eJournal> (diakses pada 05 Mei 2019)

⁴⁰ Minnie Chan, "Hu Jintao's weak grip on China's army inspired Xi Jinping's military shake-up: sources

Memperlihatkan bahwa pada masa kepemimpinannya, pemerintahan Tiongkok lebih dipengaruhi oleh individu pemimpin.

Perbedaan bentuk kebijakan yang diambil oleh tiap – tiap pemimpin Tiongkok sebelumnya menunjukkan adanya perubahan nilai yang berusaha digapai oleh Tiongkok. Perbedaan yang menjadikan kepemimpinan Xi Jinping dalam *personalistic dictatorship* dimulai pada lima tahun awal masa jabatannya di mana Xi melakukan pembersihan dan penangkapan politik baik dari dalam maupun dari luar partai Komunis dan membangun kontrol total untuk memperkuat jabatannya bahkan melebihi Mao Zedong.⁴¹ Sejalan dengan penjelasan Holsti, persepsi individu juga dapat dipengaruhi oleh citra negara yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya. Sehingga, kebutuhan ekonomi Tiongkok yang awalnya lebih banyak diatur oleh PKC kemudian menjadi lebih banyak dalam tanggung jawab Xi Jinping. Dilihat dari dibentuknya AIIB yang dianggap terlalu beresiko karena berlawanan dengan Bank Dunia dan ADB.

Tiongkok menunjukkan perubahan politik dalam bidang ekonomi dari konsep penghematan Mao menjadi lebih terbuka dan percaya diri untuk mendapatkan pengakuan atas kepemimpinan ekonomi global dengan dibentuknya AIIB.⁴² Sementara dalam faktor citra yang diharapkan terjadi, keinginan Xi Jinping untuk

President's predecessor 'isolated' by deputies who acted as proxies for Jiang Zemin: sources”, South China Morning Post, 2015, <https://www.scmp.com/news/china/article/1734663/hu-jintaos-weak-grip-chinas-army-inspired-president-xi-jinpings-military> (diakses pada 20 November 2019)

⁴¹Tom Phillips, “Xi Jinping’s power play: from president to China’s new dictator?”, The Guardian, 2018, <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/04/xi-jinping-from-president-to-china-new-dictator> (diakses pada 25 Januari 2020)

⁴²Australian Institute of International Affairs “China’s Intentions For The Asian Infrastructure Investment Bank”, Australian Institute Of International Affairs Online, <http://www.internationalaffairs.org.au/chinas-intentions-for-the-asian-infrastructure-investment-bank/> (diakses pada 25 Januari 2020)

menunjukkan pada dunia peran Tiongkok dalam dunia internasional dan pengaruh yang kuat di kawasan Asia mempengaruhi terbentuknya AIIB. Tiongkok sebagai negara yang memberikan modal utama dalam AIIB telah membentuk citra AIIB sebagai “Bank China” dan membentuk peluang yang lebih besar bagi Tiongkok untuk membuka investasi dan mempengaruhi ekonomi di kawasan Asia.⁴³

Selain itu nilai dari *Chinese dream* direpresentasikan sebagai reformasi ekonomi berupa seruan untuk mulai memanfaatkan penggunaan sumber daya yang efisien, ketergantungan terhadap konsumsi yang semakin tinggi dimanfaatkan sebagai pertumbuhan, mendorong terbentuknya industri kreatif, tekanan untuk bank memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil sebagai modal, yang semuanya harus dilanjutkan dengan reformasi lebih lanjut.⁴⁴ Sedangkan dari pemerintah melalui PKC menyebutkan bahwa visi tersebut berasal dari aspirasi, inspirasi, serta harapan masyarakat dan cita – cita tersebut sesuai dengan rancangan undang – undang. Sehingga Xi Jinping menganggapnya sebagai salah satu tujuan dari ideologi rezimnya untuk mendefinisikan impian terdahulu para pendahulunya.⁴⁵ Adanya nilai yang berusaha untuk ditunjukkan dengan perubahan kepemimpinan yang lebih bersifat individualis kemudian menjadi salah satu pendorong kuatnya persepsi Xi Jinping dalam membentuk AIIB.

⁴³Australian Institute of International Affairs “China’s Intentions For The Asian Infrastructure Investment Bank”, Australian Institute Of International Affairs Online, <http://www.internationalaffairs.org.au/chinas-intentions-for-the-asian-infrastructure-investment-bank/> (diakses pada 25 Januari 2020)

⁴⁴ Zhou Tianyong, *Zhongguo meng yu Zhongguo daolu* [The China dream and the China path] Beijing: Shehui kexue wenxian, (2011).

⁴⁵ Peter Ferdinand, “Westward ho—the China dream and ‘one belt, one road’: Chinese foreign policy under Xi Jinping”, *International Affairs* 92: 4 (2016) 941–957.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan dalam penelitian ilmiah mengenai suatu fenomena secara logis dan sistematis untuk menemukan jawaban dari masalah yang didapat dengan cara diolah, dianalisis, hingga mendapatkan kesimpulan dan jawaban akhirnya.⁴⁶ Metodologi penelitian membantu penulis untuk menentukan berkembangnya tulisan melalui cara-cara yang lebih tersusun dan logis sehingga ditemukan kesimpulan dan tujuan yang ingin ditemukan dalam penelitian. Selain itu, penggunaan metodologi penelitian membuat isi penelitian lebih terstruktur dan tertata agar lebih memudahkan pembaca mengikuti alur yang digunakan penulis dalam menjelaskan penelitian yang dituliskan.

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang dapat menjabarkan mengenai bagaimana suatu kejadian bisa berlangsung. Penjelasan yang deskriptif akan menjabarkan penelitian mengenai kata dan frasa yang digunakan untuk menjelaskan maksud dari objek yang diteliti. Pendekatan deskriptif dipilih karena dianggap akan mampu memberikan penjelasan yang lebih mudah dalam penelitian untuk dipahami oleh pembaca mengenai persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB.

Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Moleong menjelaskan sebagai penelitian yang bersifat kualitatif digunakan untuk memahami isu yang diambil dalam penelitian seperti persepsi, motivasi, perilaku, tindakan, dan lainnya

⁴⁶ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana, 1999), hal. 1

yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa dengan berbagai metode ilmiah.⁴⁷ Penelitian kualitatif dirasa mumpuni untuk menjelaskan dan memberi gambaran yang terstruktur pada penelitian ini. Hasil penelitian kualitatif lebih menjelaskan mengenai suatu makna atau pemahaman mengenai sesuatu hal yang menjadi penelitiannya menggunakan sifat deskriptif, sehingga metode kualitatif lebih banyak digunakan dalam bidang penelitian sosial.⁴⁸ Analisis inilah kemudian yang akan dijadikan landasan untuk melihat kecenderungan persepsi yang digunakan atau yang mempengaruhi individu utama yang menjadi bahan penelitian.

1.8.2. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada rentang waktu 2012 hingga 2016. Rentang waktu ini dipilih sesuai pada saat Xi Jinping mulai menjabat sebagai Presiden Tiongkok pada tahun 2012 dan mempromosikan *Chinese Dream* hingga setelah mulai berjalannya AIIB pada tahun 2016. Batasan ini dibuat agar fokus penelitian tidak melebar terlalu jauh dari bahasan utama yang ingin dianalisis.

1.8.3. Unit Dan Tingkat Analisis

Dalam penelitian ini ditentukan unit analisis dan tingkat analisis yang akan diteliti. Unit analisis merupakan peristiwa atau fenomena yang akan dijelaskan dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini unit analisis yang diambil adalah persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB. Sedangkan unit eksplanasi merupakan penyebab terbentuknya perilaku dari unit analisis, dalam penelitian ini yang menjadi unit eksplanasinya adalah nilai dari *Chinese Dream* yang berusaha untuk dicapai

⁴⁷ Lexi Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

⁴⁸ Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan", Jakarta, Kencana, 2014.

Tiongkok. Pada tingkat analisis, penelitian ini berada di level analisis individu karena yang menjadi fokus utama penelitian adalah pemimpin Tiongkok itu sendiri yaitu Xi Jinping.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis melalui penyimpulan konsep, teori, hingga nilai yang ada di dalamnya.⁴⁹ Di mana informasi yang didapat dari tulisan baik buku, jurnal, artikel ilmiah, berupa sumber elektronik, media massa, dan fisik yang didapat dengan cara mencari sumber data yang relevan sesuai arah penelitian. Tidak luput, peneliti juga mencari sumber melalui majalah populer maupun surat kabar dari media massa. Selain itu, tesis dan skripsi yang relevan dengan penelitian mengenai level analisis individu dan analisis kebijakan melalui idiosinkratik juga menjadi bagian dari data yang dikumpulkan.

1.8.5 Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang telah dikumpulkan tersebut, penulis melihat persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB melalui beberapa komponen seperti keyakinan (*belief system*), citra (*image*), dalam mempengaruhi keputusan individu. Komponen-komponen tersebut dijelaskan melalui sub pembahasan yaitu ; Informasi mengenai latar belakang Xi Jinping, tujuan dari *Chinese Dream* yang ingin dicapai, hingga pentingnya AIIB sebagai instrumen BRI untuk mencapai visi *Chinese Dream*. Komponen inilah yang kemudian menjadi gambaran penting dalam melihat pentingnya pembentukan AIIB bagi Xi Jinping.

⁴⁹ Albi Anggito, Johan Septiawan, "Metode Penelitian Kualitatif", Sukabumi, CV Jejak, 2018.

Sehingga penggunaan konsep maupun teori dalam data yang telah didapatkan akan sejalan dengan tujuan penelitian dalam melihat persepsi Xi Jinping yang mempengaruhi terbentuknya AIIB. Data yang didapat akan dijelaskan secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan kesimpulan dan jawaban dari masalah yang diteliti.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Dalam menjelaskan penelitian ini, agar menemukan jawaban dari fenomena yang dicari maka digunakan teknik *Content Analysis* atau disebut juga dengan analisis isi. Dalam tulisannya Klaus Krippendorf, disebutkan bahwa istilah analisis isi dalam bahasa Inggris baru muncul setelah tahun 1941, analisis isi dijelaskan sebagai cara untuk melihat sistematis teks, gambar, simbol yang muncul dan tidak selalu dari sudut pandang penulis atau pengguna.⁵⁰ Data yang didapat tersebut berasal dari objek yang kemudian dianalisis dan dipahami untuk dicari kesimpulannya melalui teks maupun ucapan yang valid. Lebih jelasnya, Krippendorf menyebutkan bahwa analisis isi dapat memberikan wawasan baru dalam fenomena tertentu yang sedang diteliti.⁵¹

Sejalan dengan penjelasan tersebut, Pashakhanlou juga menjelaskan bahwa dalam analisis isi kualitatif materi yang dapat menyampaikan pesan menjadi subjek analisis seperti bentuk komunikasi secara lisan dan visual seperti situs web, buku harian, artikel, surat, pidato, wawancara, gambar, video, dan sebagainya dapat

⁵⁰ Klaus Krippendorf, "Content Analysis: An Introduction to its Methodology", Sage Publication, America: 2004.

⁵¹ Krippendorf, *Content Analysis: An Introduction to its Methodology*.

digunakan dalam menganalisis.⁵² Analisis isi merangkum prosedur maupun tata cara untuk memproses data ilmiah dalam memberikan bentuk tujuan baik berupa pengetahuan, membuka wawasan baru, hingga menyajikan fakta.⁵³ Dalam metode penelitian analisis isi kualitatif telah dijelaskan bahwa sumber dari jenis penelitian dapat berupa bentuk tertulis maupun lisan dari individu yang sedang diteliti baik melalui media elektronik maupun media cetak Sehingga akhirnya dalam analisis isi kualitatif lebih banyak diambil kesimpulan dalam bentuk konteks, penulis, dan penerima. Untuk itu, secara lanjut Pashakhanlou menyebutkan bahwa penjelasan secara deskriptif lebih sering digunakan dalam analisis isi. Metode analisis isi ini juga dijelaskan Pashakhanlou dapat menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam penelitian sehingga analisis isi memiliki potensi studi sistematis tentang politik internasional dengan validitas yang tinggi.

Prosedur melakukan teknik analisis isi kualitatif dirangkum Krippendorff dalam tulisannya melalui empat elemen umum yaitu pertama memilih sampel teks yang relevan, kemudian menyatukan teks tersebut dengan mencari proposisi atau menggunakan kutipan yang ada di dalamnya, lalu menkontekstualisasikan bahan yang telah dibaca dengan menyelaraskan peristiwa atau keadaan yang menjadi dasar teks tersebut, dan yang terakhir peneliti memiliki pertanyaan penelitian tertentu yang hendak dijawab.⁵⁴ Metode analisis isi kualitatif tidak jauh berbeda dengan analisis kuantitatif secara umum, dalam metode analisis isi kualitatif tetap dibutuhkan sampel

⁵² Arash Heydarian Pashakhanlou., “Fully integrated content analysis in International Relations”, *International Relations*, 31(4), 2017: 447–465.

⁵³ Klaus Krispendoff, *Analisis Isi Pengantar Dan Teori Metodologi* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hal 15.

⁵⁴ Krippendorff, K., “Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.)”, Thousand Oaks, CA: Sage, 2004: 87.

dan *coding*.⁵⁵ Sehingga dalam penelitian memakai analisis isi kualitatif, metode analisis diawali dengan mengumpulkan data atau sampel teks yang sesuai. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data untuk menemukan kepingan-kepingan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menemukan tulisan-tulisan yang berisi keragaman perspektif, konteks, maupun ide yang berbeda dari penggunaan beragam teks dan beragam sumber.

Proses dasar dalam mengidentifikasi semua pola yang relevan dalam data terhadap suatu fenomena tersebut kemudian diinterpretasikan oleh penulis untuk melihat persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB dengan indikator keyakinan (*belief system*) dan citra (*image*) dalam mempengaruhi keputusan individu oleh Ole R. Holsti. Diawali dengan mengumpulkan data dan sampel yang sesuai baik melalui artikel, jurnal, hingga dokumentasi resmi yang kemudian datanya dikumpulkan dan dikelola sesuai konsep yang digunakan untuk melihatnya. Sehingga pada masing-masing indikator penulis menjelaskan hasil yang mampu mempengaruhi persepsi Xi Jinping dalam pembentukan AIIB.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diuraikan rencana sistematika penulisannya seperti :

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, studi pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

⁵⁵ Marilyn Domas White, Emily E. Marsh, "Content Analysis: A Flexibel Methodology", Library Trends, Volume 55, Number 1, Summer 2006: 22-45

BAB II AIIB Sebagai Instrumen *Belt and Road Initiative* Untuk Mencapai Visi *Chinese Dream*

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebijakan luar negeri BRI yang menghasilkan terbentuknya AIIB serta kolerasinya dalam membawa visi *Chinese Dream* yang diusung oleh Xi Jinping.

BAB III Sejarah Hidup Xi Jinping

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang hidup Xi Jinping termasuk keadaan keluarganya saat masa kepemimpinan Mao Zedong hingga Xi Jinping dapat menjadi pemimpin Tiongkok tertinggi tanpa memiliki batas masa jabatan.

BAB IV Persepsi Xi Jinping Dalam Terbentuknya AIIB

Bab ini akan membahas mengenai penggunaan persepsi dari individu untuk melihat pengambilan kebijakan yang diusung oleh Xi Jinping dalam terbentuknya AIIB

BAB V Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang didapat oleh penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

